

**Analisis Belanja Daerah, Studi Kasus: Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat**

Shella Kriekhoff<sup>1)\*</sup>, Elisabeth Riupassa<sup>2)</sup>

<sup>1,2)</sup> Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Ambon

<sup>1)</sup> shella.kriekhoff1970@gmail.com\*

**ABSTRACT**

*Spending is a routine government activity that is prone to leakage and inefficiency if there is no proper planning, supervision and control, therefore spending analysis must be carried out as a basis for evaluation, improvement, and correction in the future. Regional Spending of West Seram Regency during 2020-2023 has tended to decrease in terms of spending budget. This study aims to determine the performance of the West Seram Regency Government in managing its spending budget. This quantitative descriptive study uses quantitative data in the form of Government Expenditure Realization Data of West Seram Regency during 2020-2023. The data collection technique in this study is the documentation method. The data is then processed using spending growth analysis and spending harmony analysis. The Growth Analysis results show that the shows that the spending growth ratio of the West Seram Regency Government has a negative growth tendency, meaning that from year to year the amount of spending has decreased. The Harmony Analysis shows that the pattern and orientation of West Seram Regency Government spending is mostly used for employee spending, goods and services spending, Capital Expenditure, and Financial Assistance Spending. This is in line with the results of the analysis of direct and indirect spending, with almost the majority being used for indirect spending.*

**Keywords:** *spending analysis, growth ratio, spending harmony ratio.*

**ABSTRAK**

Belanja yang merupakan kegiatan rutin pemerintah yang rentan akan kebocoran dan inefisiensi jika tidak dilakukan perencanaan, pengawasan serta pengendalian yang baik, oleh karena itu analisis belanja mutlak harus dilakukan agar menjadi dasar evaluasi, perbaikan, dan koreksi ke depan. Belanja Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat selama tahun 2020 – 2023 mengalami kecenderungan penurunan jumlah belanja. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kinerja Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat dalam mengelola anggaran belanjanya. Penelitian deskriptif kuantitatif ini menggunakan jenis data kuantitatif berupa data Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat selama tahun 2020-2023. Teknik pemerolehan data dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi. Data kemudian diolah dengan menggunakan analisis pertumbuhan belanja dan analisis keserasian belanja. Hasil Analisis Pertumbuhan menunjukkan rasio pertumbuhan belanja Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat yang mengalami kecenderungan pertumbuhan negatif, artinya dari tahun ke tahun mengalami penurunan jumlah belanjanya. Analisis Keserasian menunjukkan bahwa pola dan orientasi pengeluaran pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat hampir sebagian besar digunakan untuk belanja pegawai, belanja barang dan jasa, Belanja Modal dan Belanja Bantuan Keuangan. Hal ini sejalan dengan hasil analisis belanja langsung dan tidak langsung dengan hampir sebagian besar digunakan untuk belanja tidak langsung.

**Kata kunci:** *analisis belanja, rasio pertumbuhan, rasio keserasian belanja.*

**1. PENDAHULUAN**

Anggaran pendapatan dan belanja dirancang sebagai panduan penerimaan dan pengeluaran untuk mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan, termasuk meningkatkan produksi, membuka lapangan kerja, dan mendorong pertumbuhan ekonomi demi kesejahteraan masyarakat. Sebagai tulang punggung pemerintahan, anggaran juga berfungsi sebagai alat perencanaan, stabilisasi, distribusi, pengelolaan sumber daya, dan penilaian kinerja pemerintahan (Karim, 2019). Melalui anggaran, manajemen dapat menilai efisiensi dan efektivitas belanja dengan membandingkan antara anggaran yang direncanakan dan realisasi yang dicapai.

Pengendalian proses belanja harus dilakukan dengan mekanisme yang efisien dan efektif. Pengukuran kinerja diperlukan untuk memantau dan memperbaiki kinerja serta memastikan bahwa anggaran dilaksanakan secara akuntabel dan ekonomis. Belanja pemerintah, yang rutin dilakukan, berisiko mengalami kebocoran dan inefisiensi jika tidak direncanakan dan diawasi dengan baik, sehingga analisis belanja menjadi penting sebagai dasar evaluasi dan perbaikan di masa mendatang (Oktaviani, 2020). Belanja juga merupakan elemen penting bagi masyarakat untuk menilai apakah anggaran yang dikelola pemerintah telah dijalankan secara efektif, efisien, dan benar-benar untuk kepentingan publik, contohnya bagi masyarakat Kabupaten Seram Barat.

Analisis terhadap pengelolaan belanja Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat perlu dilakukan karena telah terjadi penurunan signifikan dari anggaran belanja tersebut dari tahun 2020 hingga 2023 (Tabel 1). Penelitian ini bertujuan untuk menilai kinerja Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat dalam mengelola anggaran belanjanya selama periode tersebut. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan evaluasi yang bermanfaat bagi Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat dalam menyusun dan menggunakan anggaran belanja secara lebih efektif dan efisien

**Tabel 1. Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Periode 2020-2023**

Tahun	Belanja Tidak Langsung	Belanja Langsung	Total Belanja Daerah
2020	572.961.732.190,00	425.271.165.150,00	998.232.897.340,00
2021	539.046.334.800,00	420.748.337.200,00	959.794.672.000,00
2022	537.846.035.553,78	355.612.771.201,90	893.458.806.755,68
2023	550.606.301.327,00	321.693.352.427,00	872.299.653.754,00

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Seram Bagian Barat, 2024

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1. Akuntansi Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam satu tahun anggaran, dan tidak akan diperoleh kembali pembayarannya oleh pemerintah serta merupakan kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih (PP No. 24 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006). Belanja termasuk kewajiban pemerintah dalam bentuk pengeluaran untuk pembentukan modal, penambahan aset tetap, serta pemeliharaan yang meningkatkan masa manfaat atau kualitas aset.

Berdasarkan karakternya, belanja dikelompokkan menjadi Belanja Operasi, Belanja Modal dan Belanja Tak Terduga. Belanja Operasi mencakup pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah yang memberi manfaat jangka pendek, termasuk belanja pegawai, barang, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, dan bantuan keuangan. Belanja Modal adalah pengeluaran untuk perolehan aset tetap yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi, seperti tanah, bangunan, dan peralatan. Belanja Tak Terduga dialokasikan untuk kegiatan yang tidak biasa dan tidak diharapkan berulang, seperti penanggulangan bencana. Belanja Langsung berhubungan langsung dengan pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah, sementara Belanja Tidak Langsung tidak terkait langsung dengan pelaksanaan program (Ghozali dkk., 2008).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, belanja daerah terdiri dari beberapa klasifikasi. Belanja Operasi, mencakup pengeluaran harian pemerintah yang memberi manfaat jangka pendek, seperti belanja pegawai, barang dan jasa, bunga, subsidi, hibah, dan bantuan sosial. Belanja Modal, digunakan untuk pengadaan aset tetap dengan manfaat lebih dari satu tahun, seperti tanah, peralatan, dan bangunan. Belanja Tidak Terduga, dialokasikan untuk keadaan darurat dan kebutuhan mendesak, seperti bencana alam dan kerusakan infrastruktur. Belanja Transfer, yakni pengeluaran pemerintah daerah kepada daerah atau desa lain untuk kerja sama atau peningkatan kemampuan keuangan. Sedangkan, menurut Permendagri No. 13 Tahun 2006, belanja dikelompokkan menjadi Belanja Tidak Langsung, yang tidak terkait langsung dengan program kegiatan, dan Belanja Langsung, yang terkait langsung dengan pelaksanaan program, termasuk belanja pegawai, barang dan jasa, serta modal.

### 2.2. Analisis Belanja

Menurut Mahmudi (2010), analisis belanja daerah penting untuk mengevaluasi penggunaan APBD agar ekonomis, efisien, dan efektif. Pemerintah daerah harus fokus pada efisiensi belanja dan hasil yang dicapai, bukan

hanya pada pengeluaran anggaran. Sistem penganggaran berbasis kinerja diharapkan mendorong efisiensi dan menghindari pemborosan dengan orientasi pada *output* dan *outcome*.

Analisis anggaran, mencakup analisis varians, pertumbuhan, dan keserasian belanja, membantu dalam menilai kinerja belanja. Analisis Varians membandingkan realisasi belanja dengan anggaran untuk mengukur kinerja. Analisis Pertumbuhan Belanja melacak perkembangan belanja dari tahun ke tahun dan memastikan pertumbuhan tersebut rasional dan tidak mengganggu kesehatan fiskal. Analisis Keserasian Belanja mengevaluasi keseimbangan antara belanja operasi, belanja modal, dan total belanja untuk memastikan distribusi dan alokasi anggaran yang efektif. Analisis Keserasian Belanja mencakup beberapa aspek yakni analisis belanja per fungsi terhadap total belanja, analisis belanja operasi terhadap total belanja, analisis belanja modal terhadap total belanja, serta rasio efisiensi belanja (Mahmudi, 2010).

Analisis belanja per fungsi terhadap total belanja membandingkan belanja setiap fungsi terhadap total belanja daerah, dengan rumus rasio belanja per fungsi dibagi total belanja daerah. Analisis belanja operasi terhadap total belanja membandingkan total belanja operasi dengan total belanja daerah untuk menunjukkan porsi anggaran yang dialokasikan untuk belanja jangka pendek dan rutin, biasanya antara 60-90% dari total belanja, dengan rasio dihitung dari realisasi belanja operasi dibagi total belanja daerah. Analisis belanja modal terhadap total belanja membandingkan realisasi belanja modal dengan total belanja daerah untuk menilai porsi anggaran yang dialokasikan untuk investasi jangka panjang, biasanya antara 5-20% dari total belanja. Pemerintah daerah dengan pendapatan rendah cenderung memiliki porsi belanja modal yang lebih tinggi untuk investasi, sementara yang berpendapatan tinggi sering memiliki aset modal yang cukup. Rasio efisiensi belanja mengukur penghematan anggaran dengan membandingkan realisasi belanja terhadap anggaran belanja, dihitung sebagai realisasi belanja dibagi anggaran belanja dikalikan 100%.

### 2.3. Tinjauan Peneliti Terdahulu

Peneliti-peneliti terdahulu sudah membuktikan keberhasilan metode yang sama di daerah yang berbeda dan pengaplikasian/pendekatan yang cenderung variatif. Contoh keberhasilan beberapa penelitian terdahulu dengan konsep yang relatif mirip dengan penelitian ini dapat ditinjau dari konteks pemerintah kabupaten/kota, kedinasan, serta lembaga pendidikan.

Dalam konteks pemerintah kabupaten/kota, penelitian oleh Mendrofa dkk. (2023) menunjukkan rata-rata varians belanja sepuluh kabupaten/kota disukai, dengan delapan kabupaten/kota menunjukkan pertumbuhan belanja positif. Keserasian belanja operasi seimbang, tetapi hanya dua kabupaten/kota yang seimbang dalam belanja modal. Efisiensi belanja cenderung kurang baik, dengan faktor penghambat termasuk perencanaan, pelaksanaan, dan sumber daya manusia. Di lokasi berbeda, penelitian oleh Riswati dan Bukhori (2023) di Pemerintah Kota Bandung menunjukkan rasio keserasian belanja operasional menurun sebesar 0,69% dari tahun 2020 ke 2021, meskipun belanja operasional dan total belanja daerah meningkat. Rasio keserasian belanja modal meningkat, mempengaruhi rasio keserasian belanja operasional. Rasio efektivitas PAD konsisten tinggi, dengan angka 91,12% pada 2020 dan 91,13% pada 2021.

Dalam konteks kedinasan, Hakim dkk. (2023) menganalisis varians belanja Dinas Pemuda Olahraga dari 2018-2020 dan menunjukkan hasil bahwa kinerja baik dengan efisiensi yang memadai. Keserasian belanja operasi 2019-2020 cukup serasi, sedangkan belanja modal kurang memadai. Sedangkan, penelitian oleh Pongtasik dkk. (2023) di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Toraja Utara, varians belanja rata-rata 17,27%, dengan pertumbuhan belanja fluktuatif. Keserasian belanja operasi rata-rata 72,18% dan belanja modal 46,48%, serta efisiensi belanja rata-rata 84,44%.

Penelitian terdahulu dalam konteks lembaga pendidikan, khususnya di Poltekkes Kemenkes Tanjungpinang, kinerja belanja menurun pada 2020. Anggaran belanja dan realisasi menurun dibandingkan 2019, varians belanja meningkat, dan rasio pertumbuhan belanja turun sebesar 18,06% (Chartady dkk., 2022).

## 3. METODOLOGI

### 3.1. Jenis Penelitian dan Data

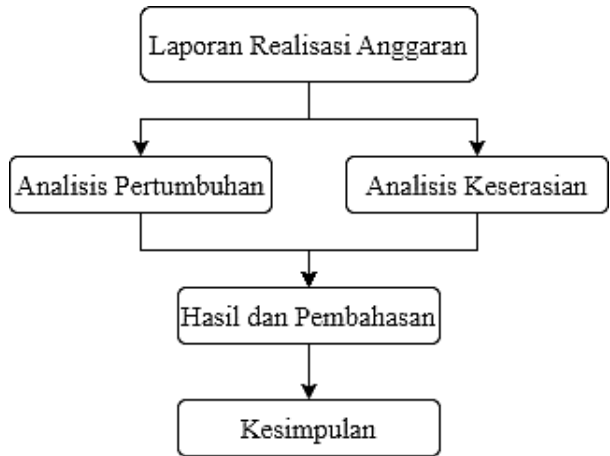
Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif yang melibatkan perhitungan data keuangan untuk mengidentifikasi dan memecahkan masalah terkait dengan tujuan penelitian. Data yang digunakan berupa angka kuantitatif dan data yang diperoleh adalah data sekunder dari "Seram Bagian Barat Dalam Angka" (Badan Pusat Statistik Kabupaten Seram Bagian Barat, 2024) yang mencakup realisasi belanja Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat dari tahun 2020 hingga 2023.

**3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini berlokasi di Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku, mencakup data Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat selama tahun 2020 hingga 2023. Penelitian ini dilakukan selama 3 bulan, dimulai dari bulan Desember 2023 hingga Februari 2024.

**3.3. Teknik Pemerolehan, Pengolahan, dan Analisis Data**

Pemerolehan data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode dokumentasi, yaitu cara memperoleh data dan informasi dari buku, arsip, dokumen, angka, dan gambar yang mendukung penelitian (Sugiyono, 2017). Analisis belanja Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat dilakukan berdasarkan data dalam Laporan Realisasi Anggaran menggunakan perhitungan dari buku Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah oleh Mahmudi (2010). Adapun tahapan analisis divisualisasi pada kerangka berpikir (Gambar 1).



**Gambar 1. Bagan Alir/Kerangka Berpikir Penelitian.**

Sumber: Dikembangkan untuk penelitian ini, 2024

**1) Analisis Pertumbuhan Belanja**

Analisis Pertumbuhan Belanja mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang dicapai dari periode berikutnya, dengan ukuran positif menunjukkan pertumbuhan belanja naik, sebaliknya ukuran negatif menunjukkan pertumbuhan belanja turun (Mahmudi, 2010). Pertumbuhan belanja dapat dihitung menggunakan persamaan (1) berikut ini:

$$\text{Pertumbuhan Belanja Thn } t = \frac{\text{Realisasi Belanja Thn } t - \text{Realisasi Belanja Thn } (t-1)}{\text{Realisasi Belanja Thn } (t-1)} \dots\dots\dots(1)$$

**2) Analisis Keserasian Belanja**

Keserasian belanja bagi pemerintah daerah bermanfaat dalam mengalokasikan keseluruhan belanja sesuai dengan kebutuhan rencana kerja anggaran (Mahmudi, 2010). Adapun analisis keserasian belanja dapat dilakukan dengan 2 tahap, yakni:

**a) Analisis Belanja per Fungsi terhadap Total Belanja**

Analisis ini penting untuk mengetahui pola dan orientasi pengeluaran pemerintah daerah. (Mahmudi, 2010). Rasio belanja per fungsi dapat dihitung menggunakan persamaan (2) berikut ini:

$$\text{Rasio Belanja per Fungsi} = \frac{\text{Realisasi Belanja per Fungsi}}{\text{Total Belanja}} \dots\dots\dots(2)$$

**b) Analisis Belanja Langsung dan Tidak Langsung**

Analisis Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung bermanfaat untuk kepentingan manajemen internal pemerintah daerah, yaitu pengendalian biaya dan pengendalian anggaran. (Mahmudi, 2010). Rasio belanja langsung dan tidak langsung dapat dihitung menggunakan persamaan (3) dan (4) berikut ini:

$$\text{Rasio Belanja Langsung terhadap Total Belanja} = \frac{\text{Total Belanja Langsung}}{\text{Total Belanja Daerah}} \dots\dots\dots(3)$$

$$\text{Rasio Belanja Tidak Langsung terhadap Total Belanja} = \frac{\text{Total Belanja Tidak Langsung}}{\text{Total Belanja Daerah}} \dots\dots\dots(4)$$

**4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

**4.1. Hasil**

Belanja Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat dikategorikan sebagai belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Belanja Tidak Langsung terdiri dari belanja Pegawai, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, dan Belanja Bantuan Keuangan serta Belanja Tidak terduga. Belanja Langsung terdiri dari belanja Pegawai, belanja Barang dan Jasa, serta Belanja Modal. Secara lengkap data Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat dapat dilihat pada Tabel 2 berikut ini.

**Tabel 2. Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat**

Keterangan	Tahun			
	2020 (Rp.)	2021 (Rp.)	2022 (Rp.)	2023 (Rp.)
Belanja Pegawai	363.918.390.150,00	370.870.153.300,00	371.189.322.782,78	383.326.114.793,00
Belanja Bunga				
Belanja Subsidi				
Belanja Hibah	8.516.382.800,00	8.104.744.500,00	11.397.300.000,00	17.900.690.000,00
Belanja Bantuan Sosial	3.645.000.000,00	2.940.413.700,00	2.527.423.508,00	150.000.000,00
Belanja Bagi Hasil				
Belanja Bantuan Keuangan	167.767.852.200,00	163.148.912.200,00	148.343.201.263,00	148.411.220.534,00
Belanja Tidak Terduga	44.459.200.190,00	862.588.000,00	4.388.788.000,00	818.276.000,00
Belanja Barang dan Jasa	253.074.145.400,00	234.295.071.600,00	212.511.126.027,90	195.356.105.669,00
Belanja Modal	156.851.926.600,00	179.572.788.700,00	143.101.645.174,00	126.337.246.758,00
<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>998.232.897.340,00</b>	<b>959.794.672.000,00</b>	<b>893.458.806.755,68</b>	<b>872.299.653.754,00</b>

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Seram Bagian Barat, 2024.

**4.2. Pembahasan**

Data Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat yang diperoleh tersebut, kemudian akan dianalisis menggunakan analisis pertumbuhan belanja dan analisis keserasian belanja (Analisis Belanja per Fungsi terhadap Total Belanja, Analisis Belanja Langsung Terhadap Total Belanja dan Analisis Belanja Tidak Langsung terhadap Total Belanja).

**a. Analisis Pertumbuhan Belanja**

Secara umum, belanja cenderung mengalami peningkatan. Peningkatan ini biasanya disebabkan oleh penyesuaian terhadap inflasi, perubahan nilai tukar rupiah, perubahan cakupan layanan, dan penyesuaian faktor

makroekonomi. Namun, dengan adanya paradigma baru dalam otonomi daerah, perlu ada upaya untuk mengendalikan belanja, meningkatkan efisiensi, dan melakukan penghematan anggaran. Analisis pertumbuhan belanja dilakukan untuk mengetahui seberapa besar pertumbuhan setiap jenis belanja, serta apakah pertumbuhan tersebut rasional dan dapat dipertanggungjawabkan. Rasio Pertumbuhan Belanja Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat dapat dilihat pada Tabel 3 berikut ini.

**Tabel 3. Rasio Pertumbuhan Belanja Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat**

Tahun	Belanja Tidak Langsung	Rasio Pertumbuhan	Belanja Langsung	Rasio Pertumbuhan	Total Belanja Daerah	Rasio Pertumbuhan
2020	572.961.732.190,00		425.271.165.150,00		998.232.897.340,00	
2021	539.046.334.800,00	-5,92%	420.748.337.200,00	-1,06%	959.794.672.000,00	-3,85%
2022	537.846.035.553,78	-0,22%	355.612.771.201,90	-15,48%	893.458.806.755,68	-6,91%
2023	550.606.301.327,00	2,37%	321.693.352.427,00	-9,54%	872.299.653.754,00	-2,37%

Sumber: Data diolah, 2024

Tabel 3 menunjukkan bahwa Belanja Tidak Langsung Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat mengalami fluktuasi. Pada tahun 2021, rasio pertumbuhannya menurun sebesar -5,92% dibandingkan dengan tahun 2020. Pada tahun 2022, rasio ini kembali turun sebesar -0,22% dibandingkan dengan tahun 2021. Namun, pada tahun 2023, rasio pertumbuhan meningkat sebesar 2,37% dibandingkan dengan tahun 2022.

Sementara itu, rasio Belanja Langsung Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat dari tahun 2020 hingga 2023 mengalami penurunan. Pada tahun 2021, rasio pertumbuhan turun sebesar -1,06% dibandingkan dengan tahun 2020. Penurunan ini berlanjut pada tahun 2022 dengan rasio pertumbuhan yang turun sebesar -15,48% dibandingkan tahun 2021, dan pada tahun 2023, rasio pertumbuhan kembali turun sebesar -9,54% dibandingkan dengan tahun 2022.

Secara keseluruhan, rasio pertumbuhan belanja daerah mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2021, rasio pertumbuhan menurun sebesar -3,85% dibandingkan tahun 2020. Penurunan ini berlanjut pada tahun 2022 sebesar -6,91% dibandingkan tahun 2021, dan pada tahun 2023, rasio pertumbuhan kembali turun sebesar -2,37% dibandingkan dengan tahun 2022.

**b. Analisis Keserasian Belanja**

Keserasian belanja bagi pemerintah bermanfaat dalam mengalokasikan keseluruhan belanja sesuai dengan kebutuhan rencana kerja anggaran. Analisis keserasian belanja dalam penelitian ini berupa:

**1) Analisis Belanja per Fungsi terhadap Total Belanja**

Analisis Belanja per Fungsi penting untuk mengetahui pola dan orientasi pengeluaran pemerintah. Analisis belanja per fungsi terhadap Total belanja dapat dilihat pada Tabel 4 yang memperlihatkan Rasio Belanja per Fungsi terhadap Total Belanja Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat tahun 2020-2023.

Berdasarkan Tabel 4, rata-rata rasio belanja per fungsi selama tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 menunjukkan alokasi belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat untuk Belanja Pegawai 38,88%, Belanja Barang dan Jasa 24,52%, Belanja Modal 16,81%, Belanja Bantuan Keuangan 16,80%, Belanja Bantuan Keuangan 16,80%, Belanja Tidak Terduga 1,68%, Belanja Hibah 0,99%, dan Belanja Bantuan Sosial 0,32%. Alokasi terbesar digunakan untuk belanja pegawai yakni rata-rata 38,88%, sedangkan alokasi terendah digunakan untuk belanja hibah yakni rata-rata 0,99%.

**2) Analisis Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung terhadap Total Belanja**

Analisis belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung bermanfaat untuk kepentingan manajemen internal pemerintah daerah, yaitu pengendalian biaya dan pengendalian anggaran. Analisis belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung terhadap Total Belanja Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat dapat dilihat pada Tabel 5.

Berdasarkan data yang ditampilkan dalam Tabel 5, terlihat bahwa selama periode 2020 hingga 2023, mayoritas anggaran Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat dialokasikan untuk belanja tidak langsung, yaitu sebesar 57,92%. Belanja ini terutama dialokasikan untuk Belanja Pegawai, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja

Bantuan Keuangan, dan Belanja Tidak Terduga. Sementara itu, belanja langsung rata-rata sebesar 42,08%, yang digunakan untuk Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal.

**Tabel 4. Rasio Belanja per Fungsi terhadap Total Belanja Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat**

Keterangan	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023	
	Realisasi	%	Realisasi	%	Realisasi	%	Realisasi	%
Belanja Pegawai	363.918.390.150,00	36,46	370.870.153.300,00	38,64	371.189.322.782,78	41,55	383.326.114.793,00	43,94
Belanja Hibah	8.516.382.800,00	0,85	8.104.744.500,00	0,84	11.397.300.000,00	1,28	17.900.690.000,00	2,05
Belanja Bantuan Sosial.	3.645.000.000,00	0,37	2.940.413.700,00	0,31	2.527.423.508,00	0,28	150.000.000,00	0,02
Belanja Bantuan Keuangan	167.767.852.200,00	16,81	163.148.912.200,00	17,00	148.343.201.263,00	16,60	148.411.220.534,00	17,01
Belanja Tidak terduga	44.459.200.190,00	4,45	862.588.000,00	0,09	4.388.788.000,00	0,49	818.276.000,00	0,09
Belanja Barang dan Jasa	253.074.145.400,00	25,35	234.295.071.600,00	24,41	212.511.126.027,90	23,79	195.356.105.669,00	22,40
Belanja Modal	156.851.926.600,00	15,71	179.572.788.700,00	18,71	143.101.645.174,00	16,02	126.337.246.758,00	14,48
<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>998.232.897.340,00</b>	<b>100</b>	<b>959.794.672.000,00</b>	<b>100</b>	<b>893.458.806.755,68</b>	<b>100</b>	<b>872.299.653.754,00</b>	<b>100</b>

Sumber: Data diolah, 2024

**Tabel 5. Analisis Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung Terhadap Total Belanja**

Keterangan	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023	
	Realisasi	%	Realisasi	%	Realisasi	%	Realisasi	%
Belanja Tidak Langsung	572.961.732.190,00	57,40	539.046.334.800,00	56,16	537.846.035.553,78	60,20	550.606.301.327,00	63,12
Belanja Langsung	425.271.165.150,00	42,60	420.748.337.200,00	43,84	355.612.771.201,90	39,80	321.693.352.427,00	36,88
<b>Total Belanja</b>	<b>998.232.897.340,00</b>	<b>100</b>	<b>959.794.672.000,00</b>	<b>100</b>	<b>893.458.806.755,68</b>	<b>100</b>	<b>872.299.653.754,00</b>	<b>100</b>

Sumber: Data diolah, 2024

## 5. PENUTUP

### 5.1. Kesimpulan

Berdasarkan analisis belanja Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat, dapat disimpulkan bahwa rasio pertumbuhan belanja cenderung negatif, menunjukkan penurunan jumlah belanja dari tahun ke tahun. Selain itu, analisis keserasian menunjukkan bahwa sebagian besar pengeluaran pemerintah difokuskan pada belanja pegawai, barang dan jasa, modal, serta bantuan keuangan, dengan porsi terbesar dialokasikan untuk belanja tidak langsung.

### 5.2. Saran

Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat disarankan untuk meningkatkan belanja daerah guna menghindari pertumbuhan negatif yang berkelanjutan, dengan cara mengidentifikasi kegiatan yang dapat dibiayai oleh anggaran daerah. Selain itu, perlu dipertimbangkan pengalihan sebagian belanja dari belanja tidak langsung jangka pendek, seperti belanja pegawai, ke belanja jangka panjang, seperti belanja modal.

## DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik Kabupaten Seram Bagian Barat, 2024, *Seram Bagian Barat Dalam Angka*  
 Chartady, Rachmad, Meifari, V., Wulandari, T., dan Utami, R., 2022, *Analisis Kinerja Belanja Dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA)*, Media Bina Ilmiah, 17(1)  
 Ghozali, Imam, dan Ratmono, D., 2008, *Akuntansi Keuangan Pemerintah Pusat (APBN) dan Daerah (APBD)*, Universitas Diponegoro, Semarang

- Hakim, Nur, Abdullah, J., dan Hasan, W., 2023, Analisis Kinerja Anggaran Belanja Dalam Laporan *Keuangan*, JEMAI: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi, 2(3)
- Karim, A., 2019, *Pengaruh Tagline Iklan Versi "Axis Hits Bonus" Dan Brand Ambassador Terhadap Brand Awareness Kartu Axis (Studi Pada Mahasiswa STIE Amkop Makassar)*, Movere Journal, 1(1), pp. 1-13
- Mahmudi, 2016, *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah* (3 ed.), UPP STIM YKPN, Yogyakarta
- Mendrofa, Yunika, D, dan Nur, M.A., 2023, *Analisis Anggaran Belanja Daerah Pada Kabupaten /Kota Di Provinsi Kalimantan Selatan Periode 2016-2020*, JIEP: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan, 6(2), pp. 1058-1069
- Oktaviani, E., 2020, *Analisis Biaya Operasional Terhadap Profitabilitas Pada PT. Jalan Tol Seksi Empat*
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
- Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- Pongtasik, Liling, R., dan Ronal, M., 2023, *Analisis Kinerja Belanja Dalam Laporan Realsiasi Anggaran Pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Toraja Utara*, Prosiding Seminar Nasional Manajemen dan Ekonomi, (2)1
- Riswati dan Bukhori, Y., 2023, Analisis Rasio Keserasian Belanja Modal dan Operasional serta Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Daerah Kota Bandung, JEKP: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik, 10, pp. 41-55.
- Sugiyono, 2017, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, CV Alfabeta, Bandung